

**POLA SIKAP DAN PERILAKU POLITIK PEREMPUAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO
TERHADAP *POLICY MAKING* BERPERSPEKTIF GENDER**

Oleh:

Sofyan Hadi

Dosen Tetap Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

ABSTRAK

Butuh cucuran keringat dalam waktu lama bagi perempuan Jember dan Bondowoso untuk memperjuangkan keterwakilan mereka di lembaga politik yang fenomenanya hingga saat ini keterwakilan perempuan di parlemen masih berbanding jauh dengan populasi perempuan di kedua kota tersebut. Perdebatan panjang menyoal pantas tidaknya perempuan duduk di kursi parlemen rupanya belum berhenti meskipun bermacam gerakan dan aksi protes mencuat di permukaan. Hal ini tentunya diakibatkan oleh sistem budaya patriarkhi yang mengakar pada masyarakat utamanya daerah pedesaan yang mayoritas bersuku Madura dan Jawa. Padahal jika ditarik benang merahnya, pengabaian isu gender berarti menisbikan fakta sosial dan pengalaman keseharian masyarakat dimana keterpurukan perempuan merupakan rantai kondisi ketidakadilan yang kemudian berdampak pada hidup masyarakat, termasuk laki-laki dari kelompok miskin dan minoritas. Akhirnya bersandar pada minoritas anggota dewan perempuan di Jember dan Bondowoso, semoga pola sikap dan perilaku politik srikandi-srikandi modern di parlemen ini bisa mewakili terwujudnya peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan yang menitik beratkan pada kepentingan dan hak-hak kaum perempuan.

Kata Kunci: *Pola, Sikap, Perilaku, Peran, Politisi Perempuan, DPRD, Kebijakan Berperspektif Gender*

PENDAHULUAN

Sejak gerakan feminisme dan isu ketidakadilan gender pertama kali masuk ke Indonesia pada awal 1960-an, dimana isu ini telah menjadi bagian dari fenomena dan dinamika sosial masyarakat Indonesia posisi perempuan semakin membaik. Kesempatan mereka untuk beraktualisasi juga semakin terbuka, salah

satunya bisa dilihat dari peran politik perempuan yang saat ini menjadi wacana global yang marak diperbincangkan. Hal itu mulai mencuat dengan terbentuknya Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pada tahun 2000 dan setahun kemudian tepatnya tanggal 19 Juli 2001 terbentuk juga sebuah forum yang bernama Kaukus Perempuan Politik (KPI) yang dipelopori oleh para perempuan yang duduk di DPR/MPR. Keinginan yang melatar belakangi kedua forum tersebut sama yakni memperjuangkan dan menegakkan hak-hak politik perempuan yang diharapkan semakin meningkat.

Peran perempuan dalam bidang dan pemerintahan memang masih minim. Secara umum anggota parlemen dunia menurut perhitungan IPU (*Inter Parliamentary Union*) baru sekitar 13,7 persen. Sedangkan Di Indonesia, dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 101.628.816 (BPS:2001) atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia, hanya 45 orang atau 9,1% yang duduk menjadi anggota dewan. Rendahnya peran perempuan dalam bidang politik bisa dilihat dari hasil setiap pemilu, dimana sekitar 8 sampai 10% yang terpilih menjadi anggota dewan. Tabel berikut memperlihatkan komposisi jumlah perempuan di DPR selama ini.

Tabel. 1
Jumlah Perempuan di DPR (1950-2009)

Masa Kerja DPR	Perempuan	Jumlah Anggota	Prosentase (%)
1950 – 1955 (DPR Sementara)	9	236	3,8
1955-1960	17	272	6,3
Konstituante : 1956-1959	25	488	5,1
1971 – 1977	36	460	7,8
1977 – 1982	29	460	8,5
1982 – 1987	39	460	8,5
1987 – 1992	65	500	13
1992 – 1997	62	500	12,5
1997 – 1999	54	500	10,8
1999 – 2004	45	500	9,1
2004 – 2009	50	500	12
2009 – 2014	103	560	19

Sumber: Kompas, 9 February 2009

Dari 30 daerah tingkat propinsi di Indonesia hanya ada 1 (satu) orang pemimpin yang dijabat oleh perempuan. Sedangkan dari 336 daerah tingkat kabupaten hanya 10 daerah yang kepala daerahnya adalah perempuan (lihat tabel berikut ini) :

Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD
Menurut Jenis Kelamin di Seluruh Indonesia

Daerah Propinsi	Laki-laki	Perempuan	Total
Ketua DPRD	26	1	27
Wakil Ketua DPRD 1	24	0	24
Wakil Ketua DPRD 2	23	1	24
Wakil Ketua DPRD 3	22	0	22
Daerah Kabupaten			
Ketua DPRD	239	6	245
Wakil ketua DPRD 1	241	5	246
Wakil ketua DPRD 2	233	5	238
Wakil ketua DPRD 3	173	0	173

Sumber : Surat Kabar Harian *Kompas*, Februari 2009

Kondisi ini membuat keterlibatan perempuan dalam pembuatan keputusan sangat sedikit, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan seringkali sangat bias gender, dan cenderung merugikan perempuan. Misalnya APBD yang diputuskan pemerintah dan DPRD seluruh propinsi di Indonesia, dimana budget khusus perempuan disatukan dalam sector kesehatan, kesejahteraan social, peranan wanita, anak dan remaja, yang jumlahnya dibawah 10% dari APBD.

APBD Propinsi. Th Anggaran 2000
Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita,
Anak dan Remaja

Daerah	Sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja	Daerah	Sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja
DI. Aceh	7.94	Jatim	8.56
Sum. utara	6.28	Bali	5.11
Sum. barat	6.21	Kalteng	5.55
Riau	5.29	Kalsel	3.87
Jambi	6.36	Sulut	5.38
Sum. selatan	6.01	Sulteng	4.59
Bengkulu	5.93	Sulsel	7.14
DKI Jakarta	3.66	NTT	12.72
Jawa barat	7.70	Papua	4.14
Diy	4.95	Maluku Utara	6.3

Sumber: Data Bappenas th 2000

Ariwibowo dan M. Asfar dalam jurnal wanita (1996), yang meneliti perempuan anggota dewan di Jawa Timur menunjukkan 57% merasa tidak mampu mempengaruhi dan bersikap terhadap pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Dan sebanyak 43% merasa mampu hanya dalam konteks partainya dengan alasan karena ada masalah structural kekuasaan yang harus diperhitungkan.

Menurut Nadesdha Shvedovan dalam Azza Karen et al (1999) ada beberapa factor yang akan mempengaruhi peran perempuan dalam politik, yaitu system pemilu itu sendiri, peran dan organisasi partai politik, serta penerimaan cultural. Selain itu struktur social-politik masyarakat yang masih patriakhi menyebabkan posisi perempuan ter subordinasi, dalam bentuk eksploitasi, marginalisasi dan feminasi dan pengibu-rumahtangga (*housewifezation*). Tekanan budaya patriakhi menyebabkan apabila perempuan ingin mengembangkan diri, mereka harus menyelesaikan peran domestiknya lebih dulu.

Tren gerakan untuk keterwakilan perempuan telah menjadi mode dalam rekrutmen dan kaderisasi partai. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang

diantaranya adalah, apakah rekrutmen terhadap partai adalah atas dasar kehendak perempuan sendiri atau hanya menjadi instrumen mesin politik dan skenario yang lebih besar, apakah masuk partai hanya karena musiman, mereka tidak punya komitmen terhadap perubahan sosial dan pembangunan bangsa, dan terakhir, rekrutmen di tingkat lokal belum ditujukan untuk memperkuat Partai dalam menghasilkan legislasi yang pro-perempuan.

Ada kecenderungan kuat bahwa dalam pemilu 2004 parpol menggunakan isu kuota 30% sebagai salah satu strategi meraih dukungan suara perempuan, artinya suara perempuan hanya dijadikan alat pengumpul suara dan belum menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan atau kebijakan negara terkait dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Menurut hasil poling Kompas di 9 kota di Indonesia, sebagian besar masyarakat (49,3 perempuan dan 65,6% laki-laki) menyatakan bahwa besarnya kuota atau jumlah ruang keterwakilan perempuan tidak menunjukkan besarnya kesadaran politik perempuan tetapi hanya merupakan iming-iming politik.

PEMBAHASAN

Kajian Teoretis

A. Sikap dan Perilaku Politik

Secara harfiah, perilaku berarti perbuatan, tindakan, atau sikap (Partanto, P.A dan Albarry, M.D, 1994). Perilaku politik menurut Robert Carr dalam Sostroatmojo (1995) merupakan suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Ramlan Surbakti (1992) menyatakan bahwa perilaku politik menunjukkan adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga-lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik, sehingga perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Perilaku politik berkenaan dengan suatu tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta system kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.

Perilaku politik bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi mengandung keterkaitan dengan hal-hal lain. Perilaku politik yang ditunjukkan oleh individu merupakan hasil pengaruh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang menyangkut lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya.

Perilaku politik berkaitan dengan sikap politik meskipun keduanya perlu dibedakan. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut (Ramlan Surbakti, 1992:131). Sikap belum merupakan suatu tindakan tetapi baru merupakan kecenderungan atau pre-disposisi. Dari suatu sikap tertentu dapat diperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan berkenaan dengan obyek yang dimaksud.

Sikap mengandung tiga komponen yaitu kognisi (ide dan konsep), afeksi (kehidupan emosional), dan konasi (kecenderungan bertingkah laku). Secord dan Backman, dalam Azwar (1995) menyatakan bahwa sikap merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan prediposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap lingkungannya. Sehingga berdasarkan pemahaman diatas, sikap politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek tertentu yang bersifat politik sebagai hasil penghayatan obyek tersebut.

B. Gender

Secara singkat makna kata "gender" dalam kamus adalah jenis kelamin (Partanto, P.A. dan Al Barry, M.D, 1994). Sementara dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary gender adalah penggolongan gramatikal terhadap kata benda, kata sifat dan kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan dua jenis kelamin serta kenetralan atau ketiadaan jenis kelamin.

Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial rumusan gender merujuk pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan bentukan sosial, dimana perbedaan-perbedaan itu tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin .

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan secara umum terbagi dalam dua teori besar, yaitu teori nature dan teori nurture (Hidayatullah, 2009). Teori nature menyatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis, dimana sederet perbedaan biologis menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. Sedangkan teori nurture mengungkapkan bahwa perbedaan peran sosial lebih ditentukan oleh faktor budaya, dimana pembagian peran laki-laki dan perempuan dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.

Sementara itu menurut Umar (2001), peran publik atau *public role* seringkali dihadapkan dengan peran domestik atau *domestic role*. Pertama, peran publik diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri kaum lelaki yang merupakan warisan kultural dari masyarakat primitif sebagai pemburu (hunter). Kedua, peran domestik dianggap sebagai dunia kaum perempuan yakni sebagai peramu (gatherer), yang kemudian dari rumusan kedua perbedaan peran tersebut diteruskan kepada masyarakat agraris dimana laki-laki ditempatkan di luar rumah (public sphere) untuk mengelola pertanian dan perempuan di dalam rumah (domestic sphere) untuk mengurus keluarga.

Tekanan budaya patriarkhi menyebabkan apabila perempuan ingin mengembangkan diri dan berperan pada dunia publik, maka mereka harus menyelesaikan lebih dulu peran domestiknya. Oleh karena itu dalam hal pilihan jenis pekerjaan, terdapat ciri-ciri:

1. sesuai dan dapat dikombinasikan dengan kegiatan reproduksi khususnya kegiatan pemeliharaan anak
2. posisi subordinat terhadap pekerjaan pria dan hubungan hierarki terhadap umur
3. merupakan perpanjangan dari kegiatan perempuan di sektor domestik

C. Kebijakan Berperspektif Gender

Perjuangan mewujudkan keadilan berperspektif gender pada dasarnya telah ditempuh melalui beberapa strategi, diantaranya mulai dari meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan (*Women in Development/WID*) di tahun 60-an, penyelenggaraan berbagai training sensitivitas gender dan dilanjutkan dengan pengintegrasian gender ke dalam proyek pembangunan (*Gender and Development/GAD*) di sepanjang 70&80-an, serta penggunaan sarana advokasi, studi dan perencanaan kebijakan yang menargetkan pada organisasi dan intuisi (*Gender Mainstreaming/GM*) pada awal tahun 2000.

Konsep kebijakan berperspektif gender merupakan perkembangan dari pemikiran yang melihat adanya ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Dalam catatan sejarah parlemen di Indonesia 1955-2004 menunjukkan bahwa jumlah perempuan menjadi anggota DPR-RI tidak pernah sebanding dengan kaum Adam. Panggung negara masih didominasi oleh politisi dan birokrat laki-laki sehingga konsekwensinya kebijakan yang dihasilkan dapat berpotensi meminggirkan perempuan.

Beberapa hal yang menyebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan masih mengabaikan kepentingan dan hak-hak perempuan diantaranya disebabkan oleh tidak adanya keadilan gender dalam pengambilan kebijakan dalam pemerintah dan masih kuatnya kultur patriarkhis. (Sri Lestari dalam Jurnal Perempuan No.19, 2001)

Ada beberapa alasan mengapa perspektif gender penting dipahami oleh anggota dewan. (Irianto,S dan Hendrastiti T.K):

1. Menyangkut kewenangan dan fungsi anggota parlemen dalam hal legislasi, penganggaran (budgeting) dan pengawasan (monitoring)
2. Ketiadaan perspektif gender melahirkan perancangan anggaran yang tidak adil karena tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan realistis kaum perempuan dan anak-anak, khususnya kelompok miskin.
3. Ketiadaan keterwakilan perempuan secara memadai di parlemen juga akan melahirkan keterbatasan akses kaum perempuan, terutama kelompok miskin untuk menyuarakan kepentingannya.
4. Kondisi hidup warga Negara merupakan cermin dari hasil output maupun outcomes kebijakan politik.

Konsep kebijakan berperspektif gender, menurut Propernas, yaitu pemerintah membuat kebijakan pengarusutamaan gender, yaitu kebijakan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu dengan sasaran peningkatan kualitas peranan perempuan dalam bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan social dan budaya, kebijakan untuk pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan, bertujuan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, serta kebijakan untuk peningkatan peran masyarakat dan pemampuan kelembagaan pengarusutamaan gender. (propenas VIII hal 25-28).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tipe penelitian ini bercorak *survey research* yang menyandarkan pada kuesioner dan sebagainya, tetapi lebih bersifat kualitatif yang sangat bergantung pada kemampuan observasi, interview dan interpretasi dalam penelitian ini terhadap gejala-gejala yang terjadi di luar penelitian resmi. Yaitu gejala-gejala yang tidak ditetapkan sebelumnya dalam rumusan masalah. Lebih dari itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi (Muhadjir, 2000: 27-29). Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis dari pelaku yang diamati sebagai bagian yang utuh untuk memperoleh makna yang mendalam (Taylor & Bogdan, 1975).

Fokus dari pendekatan kualitatif adalah interaksi manusia dan proses-proses yang mereka gunakan (Williams, dalam Faisal, 1990). Pendekatan ini berusaha memahami interaksi dan prosesnya yang merupakan fenomena yang memiliki makna tersendiri (Moleong, 1990). Selanjutnya fenomena tersebut dikaji lebih jauh melalui interpretasi dan kajian kritis sehingga dapat diperoleh jawaban atas mengapa fenomena itu muncul, bagaimana proses terjadinya, bagaimana implikasinya (Lincoln & Guba, 1985).

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Pilihan lokasi ini didasarkan pada keterjangkauan peneliti, serta relasi komunikasi yang lebih mudah. Selain itu perbedaan komposisi mayoritas partai dalam dewan atau parlemen diharapkan dapat memberikan makna yang lebih lengkap dan mendalam.

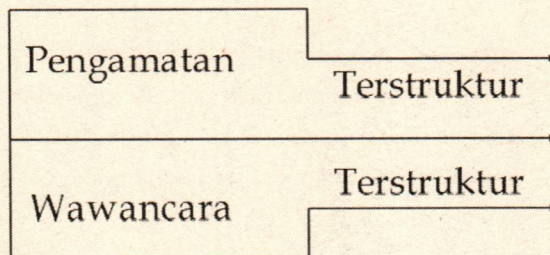
2. Karakteristik Informan

Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari ibu rumah tangga dan politis perempuan anggota DPRD di Kabupaten Jember dan Bondowoso yang mempunyai emban yang cukup berat sebagai anggota dewan (penyambung lidah) konstituen yang sibuk dengan urusan sidang-sidang dewan juga tanggapan ibu rumah tangga yang mempunyai banyak waktu untuk dimintai informasi, telah lama dan intensif menyatu dengan medan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian, terlibat secara penuh pada lingkungan dimana kegiatan yang menjadi sasaran penelitian, serta informasi yang diberikan cenderung tidak dikemas terlebih dahulu. (Spradley, 1990)

Teknik yang digunakan dalam menjangkau informan adalah teknik bola salju (*snowball technique*), yaitu informan pertama dijadikan pedoman untuk menelusuri informan lainnya sehingga informasi yang diperoleh dapat diperluas untuk tujuan analisis. Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi dokumenter. Observasi dilakukan terhadap pola interaksi anggota DPRD perempuan dengan masyarakat konstituen. Juga bagaimana pola sikap dan perilaku mereka terhadap masyarakat luas yang tersebar dalam berbagai kegiatan sidang (inspeksi mendadak) ke pasar-pasar, hearing dengan masyarakat, dan bhakti sosial, hal itu dilakukan tentu

semuanya berperspektif gender. Kemudian, data yang dihasilkan akan disajikan dalam bentuk table-tabel, histogram, grafik serta uraian-uraian peneliti yang didasarkan atas filosofis *symbolic interaction*.

Metode pengumpulan data adalah pengamatan dan wawancara yang merupakan metode yang lazim digunakan oleh para etnograf. Pengamatan dilakukan dengan mendalam baik terhadap dokumentasi primer maupun sekunder dan wawancara mendalam dan sambil lalu dikembangkan secara luwes dan fleksibel sebagaimana yang dikemukakan oleh Spradley (1980 : 34) Skema proses pengamatan dan wawancara digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 1.
Proses Pengamatan dan Wawancara

Untuk penelitian ini digunakan pengamatan terlibat (*participation observation*), wawancara mendalam dan artifak juga menggunakan metode :

A. Trianggulasi

Data yang dikumpulkan dengan pengamatan terlibat, wawancara dan pengamatan artifak diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi data. Yaitu dengan cara mencari data yang mendukung atau tidak bertentangan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan Trianggulasi data adalah untuk mengetahui sejauh mana temuan-temuan lapangan benar-benar representatif.

Sedangkan untuk validitas data dilakukan diskusi dengan yang bersangkutan (Moeloeng, 1993 : 53). Wawancara mendalam dengan sumber data digunakan pedoman perspektif emik. Untuk keperluan triangulasi data juga dilakukan chek-recek, cross chek, konsultasi dengan pimpinan DPRD Jember dan Bondowoso, para politisi khusus politisi perempuan, para ibu dan perempuan calon dan ibu rumah tangga, warga partisipan program, kalangan luar DPRD dan juga konsultasi dengan ahli dengan cara *expert judgement*.

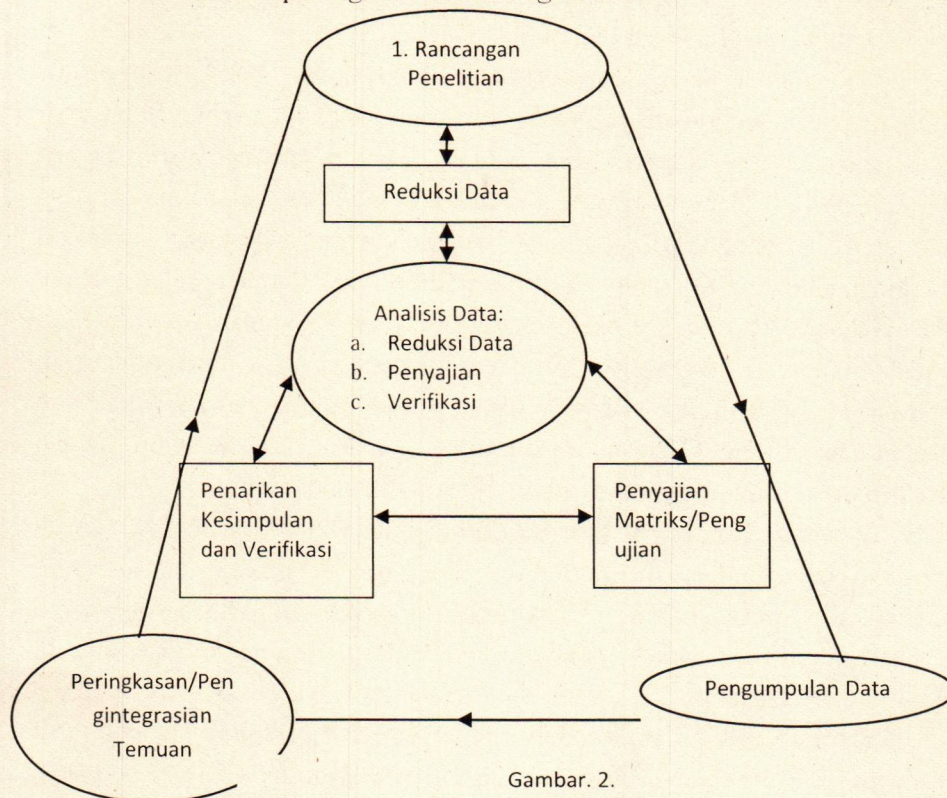
B. Kodifikasi

Untuk memandu peneliti melangkah ke tahap analisis data, catatan lapangan yang begitu banyak kemudian diringkas, ditelusuri tema sentralnya, dikelompokkan ke dalam gugus-gugus, dikoding (kodifikasi). Miles dan Huberman menyatakan bahwa kode adalah peralatan yang mengorganisasikan ke dalam permasalahan atau tema (Miles dan Huberman, 1994 : 88).

C. Analisis Data

Alur analisis yang ditempuh menggunakan Model Interaktif dari versinya Keeves & Souden, yaitu empat tahap besar dalam penelitian kualitatif yaitu : 1. Rancangan Penelitian, 2. Pengumpulan Data Lapangan, 3. Analisis Data Kualitatif, 4. Peringkasan dan Pengintegrasian hasil temuan (penarikan kesimpulan dan verifikasi) (Sudarsono, FX, 1995 : 1)

Hal itu dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 2.
Model Analisis Interaktif Versi Keeves & Sowden

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

- a. Bagaimana sikap dan perilaku politisi perempuan anggota dewan hasil pemilu 2009 berperan pada pembuatan keputusan yang memihak pada kepentingan dan penegakan hak-hak perempuan.

Seperti yang termaktub dalam sebagian besar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa peran dan sikap perempuan sebagai anggota dewan yaitu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember nomor 04 Tahun 2010 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, dimana fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah, dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Jumlah anggota dewan perempuan di Jember dan Bondowoso belum mencapai separuh dari jumlah anggota dewan laki-laki. Dari 50 anggota dewan di Jember hanya 7 orang anggota yang berjenis kelamin perempuan, ini berarti hanya 14% dari 86% kaum adam. Sementara di Bondowoso dimana masyarakatnya berlatang belakang santri yang notabene teguh memegang prinsip patriarkhi, dari 41 anggota hanya 2 orang perempuan (4,88%) yang duduk sebagai anggota dewan. Hal ini berbanding terbalik dengan fakta bahwa jumlah perempuan di Jember lebih banyak dari laki-laki, yang secara logika seharusnya perempuan lah yang paling banyak duduk sebagai anggota dewan. Akibatnya kebijakan dan peraturan daerah yang dihasilkan pada umumnya masih tidak mengatur hal-hal yang substansial dan kondusif secara khusus untuk kaum perempuan.

Dari keempat komisi (A, B, C, dan D) di DPRD Jember, anggota dewan perempuan hanya berhasil menduduki posisi sebagai wakil ketua dan sekretaris saja. Ini pun hanya pada komisi A yakni ibu Evi Lestari, SE.M.Si sebagai wakil ketua dan ibu Rr.Lili Safiani, SH sebagai sekretaris. Sedangkan di komisi B, hanya ibu Lilik Ni'amah, S.Tp yang duduk sebagai wakil ketua, sementara ibu Illa Yadhilubi, ibu Khosidah, ibu Ambar Listyani, dan Hj.Indah Wahyuni, SE berturut-turut hanya berada di posisi anggota saja. Untuk DPRD Kabupaten Bondowoso, posisi ibu Hj.Juhairiyah dan ibu Yulia Restika,SE. keduanya hanya sebagai anggota.

Pola sikap dan perilaku politik anggota dewan perempuan di Jember dan Bondowoso adalah aktif, kritis, dan prosedural. Definisi aktif disini mencakup sikap giat, tanggap, selalu bergerak menuju pencapaian target pembangunan yang dicanangkan demi kemakmuran rakyat. Kritis merupakan bentuk sikap tegas, tajam dan mendalam dalam menanggapi dan memberikan penilaian terhadap rancangan maupun kebijakan yang sudah ditetapkan. Prosedural merupakan sikap mengikuti aturan yang mahsyur dengan istilah "*sami'na wa ato'na*" selama peraturan dan kebijakan sesuai dengan koridor agama dan hukum serta mengedepankan kepentingan rakyat.

- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap dan perilaku politik perempuan anggota dewan ?
 1. Faktor intern, yang meliputi; a) Keberanian : Dengan keberanian, keberadaan mereka walaupun hanya sebatas wakil, sekertaris atau bahkan hanya anggota membuktikan bahwa mereka bukanlah instrumen mesin politik yang tidak punya komitmen terhadap perubahan sosial dan pembangunan bangsa yang dewasa ini merupakan tren gerakan keterwakilan perempuan yang bertujuan memperkuat partai dalam hal legislasi perempuan guna memberikan keuntungan plus bagi partai yang mengusung. b) Kejujuran : tegas mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar tanpa pandang teman atau lawan. c) Tanggung jawab : melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah diemban. d) Percaya diri : keyakinan kuat bahwa apa yang dijalankan sudah berdasarkan koridor yang benar. e) Semangat : tekad dan keinginan kuat untuk mencapai apa yang diharapkan rakyat.
 2. Faktor ekstern, diantaranya; a) Dukungan keluarga : keluarga merupakan tempat memperoleh dukungan dan motivasi diri. b) Background pendidikan : pendidikan yang memadai memberikan sumbangsih yang sangat berarti dalam kiprahnya mewakili rakyat. c) Pengalaman : pengalaman merupakan pelajaran berharga dalam menentukan sikap dan perilaku sehari-hari. d) Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) : Kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya bahwa jumlah anggota DPRD perempuan yang sangat minim yakni di Bondowoso sebanyak 2 atau 4,88% dan di Jember sebanyak 7 orang atau 14% maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pola sikap dan perilaku politik anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Bondowoso pada dasarnya sama yakni aktif (giat bergerak menuju perubahan yang lebih baik), kritis (tajam, tegas, dan teliti dalam menanggapi maupun memberikan saran dan penilaian), serta prosedural (bekerja sesuai peraturan)
2. Sikap dan perilaku politik anggota dewan perempuan secara general yaitu cerdas, tangkas, tegas, disiplin, mandiri, tanggap, tepat dan akurat mengemban fungsi ganda (istri&ibu rumah tangga, politisi, pejabat publik) dengan kodratnya memiliki perilaku sebagai perempuan yang tercipta berinsting suka akan keindahan, kerapian dan kelembutan terutama dalam hal pengambilan kebijakan yang memihak pada kepentingan dan penegakan hak-hak perempuan dalam pengarusutamaan gender.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku politik anggota dewan perempuan Jember dan Bondowoso terhadap policy making berperspektif gender adalah:
 - a. Faktor internal : keberanian, kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, dan semangat.
 - b. Faktor eksternal : dukungan keluarga, background pendidikan, pengalaman, dan tupoksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Sheila and Carol Wolkowitz. 1987. *Home working, myth and politics*. Houndmills: Macmillan, USA
- Bogdan and Taylor. 1975. *Introduction to qualitative research method: a phenomenological approach to the social science*. New York: John Wiley USA.
- Budhi Shanti, *Kuota perempuan parlemen: jalan menuju kesetaraan politik*, dalam jurnal perempuan No. 19/2001
- Gadis Arivia. "Pendobrakan yang Tiada Hentinya." *Dalam Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas, 2006), 10:23
- Husen Muhammad, 2000. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS
- James Spradley, 1990. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Khofifah Indar Parawansa. *Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia in Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah*. <http://www.idea.int/publication/wip/ba/cfn>
- Mansour Faqih, 1996. *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta Pustaka: Pelajar
- _____, 1999. *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nadesha Shedova. "Kendala-kendala Terhadap Partisipasi Perempuan" dalam *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah*, (Sweden: International IDEA), 2002, 19-40 viewed 20 January 2009, <http://www.idea.int/publications/wip/ba/cfn>
- Nasrudin Umar, 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina,
- Noeng Muhadjir, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi V, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Ramlan Surbakti, 1992. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana
- Saefuddin, *Paradigma Baru Dalam Kajian Fiqh Berkeadilan Gender*, Jurnal *al-Adalah STAIN Jember* Vol.5 No.2 Agustus 2002
- Sastroatmodjo, 1995. *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sunyoto Usman, 1999. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sri Yuniati, 2001. *Pengaruh informasi gender di media cetak wanita terhadap sikap ibu rumah tangga mengenai kemitrasejajaran pria dan wanita*, Tesis. Universitas Padjajaran Bandung, tidak diterbitkan
- Sri Lestari, *Kendala-kendala pengembangan penelitian komunikasi di Indonesia*. dalam jurnal ISKI Vol. VII, April 1999.
- Sulistyowati Irianto dan Titiek Kartika Hendrastiti. *Buku Panduan Tentang Gender di Parlemen*. www.dpr.go.id dan www.undp.or.id
- Tim Penyusun DPRD Kab. Jember, 2009. *Profile & Komitmen Wakil Rakyat Kabupaten Jember*. Jember: DPRD Kabupaten Jember
-
- _____, 2007. *Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe dan Sekarang*. Jember: DPRD Kabupaten Jember